

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR  
MISKIN DI DESA LUENG BARO KECAMATAN SUKA  
MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Negara

**OLEH**

**MAULIDAR**  
**1705905010100**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH - ACEH BARAT  
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Email: [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id) KodePos23615

Meulaboh, 04 Oktober 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MAULIDAR  
NIM : 1705905010100

Dengan judul : Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa  
Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,  
Pembimbing

**Nodi Marefanda, M.A.P**  
NIP: 198909022019031010

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua  
Program Studi Administrasi Negara

**Basri, SH., MH**  
NIP. 196307131991021002

**Fadhil Ilhamsyah, M.Si**  
NIDN. 0017109101



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH ACEH BARAT**

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id) Email: [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id) KodePos23615

Meulaboh, 04 Oktober 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MAULIDAR  
NIM : 1705905010100

Dengan judul : Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa  
Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 30 September 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus.

Menyetujui,  
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Nodi Marefanda, M.A.P .....
2. Anggota : Nellis Mardhiah, M.Sc .....
3. Anggota : Sri Wahyuni Handayani, M.Si .....

Ketua Program Studi  
Administrasi Negara

**Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si**  
NIDN. 0017109101

## LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULIDAR  
NIM : 1705905010100

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar tulisan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya akan bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan orisinilitas skripsi ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Meulaboh, 04 Oktober 2021

MAULIDAR  
NIM: 1705905010100

## ABSTRAK

**Maulidar. NIM: 1705905010100. Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Dibawah bimbingan Nodi Marefanda, M.A.P**

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok fakir miskin untuk melaksanakan program pemberdayaan. Oleh karena itu, peran Dinas Sosial sangat diperlukan dalam program pemberdayaan khususnya terhadap masyarakat fakir miskin sebagai target penerima program pemberdayaan dalam upaya menyelesaikan masalah kemiskinan di Desa Lueng Baro Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin dan mengetahui ketepatan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam memberdayakan fakir miskin di Desa Lueng Baro, yang masih belum optimal yakni peran Dinas Sosial dalam melaksanakan pemberdayaan fakir miskin tersebut masih belum tepat sasaran sehingga terdapat sebagian kecil masyarakat fakir miskin yang masih belum mendapatkan program pemberdayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. (b) Ketepatan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan belum sesuai target yang diharapkan dikarenakan berbagai program tersebut masih belum optimal terutama terkait dengan data fakir miskin yang didata Pemerintah Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, Fakir Miskin



## *ABSTRACT*

**Maulidar. NIM: 1705905010100. The Role of Social Services in Empowering the Poor in Lueng Baro Village, Suka Makmue District, Nagan Raya Regency. Under the guidance of Nodi Marefanda, M.A.P**

Improving the standard of living of the community in targeted empowerment is needed by providing opportunities for the poor to implement empowerment programs. Therefore, the role of the Social Service is very necessary in the empowerment program, especially for the poor as the target recipient of the empowerment program in an effort to solve the problem of poverty in Lueng Baro Village. implemented by the Social Service in Lueng Baro Village, Suka Makmue District, Nagan Raya Regency.

The results showed that (a) The role of the Social Service of Nagan Raya Regency in empowering the poor in Lueng Baro Village, which is still not optimal, namely the role of the Social Service in implementing the empowerment of the poor is still not right on target so that there are a small number of poor people who are still not received an empowerment program from the Nagan Raya District Social Service. (b) The accuracy of empowering the poor carried out by the Social Service in Lueng Baro Village in carrying out empowerment activities has not met the expected target because the various programs are still not optimal, especially related to the data for the poor, which are recorded by the Lueng Baro Village Government, Suka Makmue District, Nagan Raya Regency.

Keywords: Role, Empowerment, Poor



UNIVERSITAS TEUKU UMAR

## BIODATA PENULIS

### I. Identitas Penulis:

Nama : Maulidar  
Tempat/Tgl.Lahir : Meulaboh/ 3 September 1997  
Umur : 24 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Golongan Darah : A  
Status Kawin : Belum Menikah  
Alamat : Desa Ranup Dong Kecamatan Meuruebo Kabupaten Aceh Barat  
Nomor Kontak : 0852 1322 6133  
Email : maulidar356@gmail.com

### II. Pendidikan Formal

2006 - 2011 : SD Negeri 1 Ranto Panyang Kabupaten Aceh Barat  
2011 - 2014 : SMP Negeri 2 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat  
2014 - 2017 : SMK Negeri 3 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat  
2017 - 2021 : Universitas Teuku Umar

Alue Penyareng, 04 Oktober 2021

Maulidar



## PERSEMBAHAN

*Bismillah Hirahmanirahim*

*Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah*

*Sujud dan syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, atas izin Allah yang telah memberikanku kesehatan, kemudahan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan untukku.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tuaku ayahanda Jbnu Amin dan Ibunda Erliana serta seluruh keluarga besarku. Terimakasih atas segala dukungan, nasehat, perhatian, dan kebaikan yang telah kalian berikan untukku.*

*Ayahanda dan Ibunda dan tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.*

*Kepada adik-adikku tersayang Lisa Fitria, Riski Muliadi, Reza Safitra, Nenek, Supriadi dan keluarga besar yang saya sayangi. Terimakasih atas segala motivasi dan kasih sayang yang telah kalian berikan untukku. Terimakasih untuk kalian semua yang sangat istimewa dalam hidupku, terimakasih atas doa-doa yang telah membuatku semangat untuk melewati semua ini.*

*Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 atas motivasi, dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama-sama yang sangat berkesan untukku serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian penyelesaian skripsi ini Tiada kata yang bisaku kupersembahkan untuk kalian melainkan kata terimakasih.*

*Maulidar*





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas kuasa Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang dada kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungsajikan kepada baginda Rasulullah Saw yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AN) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan tulus, ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

- 1) Kedua orang tua Ayahanda Ibnu Amin dan Erliana serta saudari kandung saya yang bernama Lisa Fitria, Riski Muliadi, dan Reza Safitra yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
- 2) Bapak Nodi Marefanda, M.A.P selaku Dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 3) Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'aruf SE, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

- 4) Bapak Basri, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- 5) Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- 6) Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh
- 7) Sahabat-sahabat Maisarah Sartika, Putry darmawan yanti, Irma Lisa, Nuril Aina, Fitria Munawarah. Dan terimakasih kepada Supriadi yang selalu memberikan saya motivasi, nasehat dan dukungannya untuk cepat menyelesaikan skripsi
- 8) Kawan-kawan di Program Studi Administrasi Negara angkatan 2017 beserta seluruh Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu bersama disaat kuliah.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah Swt dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Meulaboh, 04 Oktober 2021  
Penulis

Maulidar

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Konsep Peran.....	9
2.2.1. Pengertian Peran.....	9
2.2.2. Peran Dinas Sosial.....	10
2.3. Konsep Pemberdayaan .....	11
2.3.1. Pengertian Pemberdayaan .....	11
2.3.2. Tujuan dan Pendekatan Pemberdayaan.....	12
2.4. Konsep Fakir Miskin .....	14
2.5. Kerangka Berfikir.....	16
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	17
3.1. Metode Penelitian.....	17
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
3.2.1. Sumber Data.....	17
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.3. Teknik Penentuan Informan .....	19
3.4. Instrumen Penelitian.....	19
3.5. Teknik Analisis Data.....	19
3.6. Pengujian Kredibilitas Data .....	20

3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	23
4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.....	25
4.2.1. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya....	25
4.2.2. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.....	28
4.3. Hasil Penelitian .....	33
4.3.1. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya .....	33
4.3.1.1. Peran Dinas Sosial Dalam Menyusun Rencana Pemberdayaan Fakir Miskin.....	33
4.3.1.2. Peran Dinas Sosial Dalam Menyiapkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin .....	36
4.3.1.3. Peran Dinas Sosial Dalam Mensosialisasikan Program Pemberdayaan Fakir Miskin .....	38
4.3.1.4. Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro .....	41
4.3.2. Ketepatan Pemberdayaan Fakir Miskin Yang Dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya ....	46
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
5.1. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya .....	52
5.1.1. Peran Dinas Sosial Dalam Menyusun Rencana Pemberdayaan Fakir Miskin.....	54
5.1.2. Peran Dinas Sosial Dalam Menyiapkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin .....	55
5.1.3. Peran Dinas Sosial Dalam Mensosialisasikan Program Pemberdayaan Fakir Miskin .....	56
5.1.4. Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin.....	58
5.2. Ketepatan Pemberdayaan Fakir Miskin Yang Dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.....	60

<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab lambatnya perkembangan suatu negara. Kondisi ini masih menjadi masalah klasik di negara Indonesia yang tidak bisa terlepas dari belenggu kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2020 menunjukkan jumlah kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Maret 2020 yakni sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,28 juta orang dibanding pada bulan Maret 2019 (BPS, 2020).

Salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yakni Provinsi Aceh yang terletak paling Barat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional menempatkan provinsi Aceh sebagai Provinsi termiskin ke-7 di Indonesia pada klaster Semester 1 tahun 2020 (BPS, 2020). Adapun salah satu kabupaten yang masih memiliki jumlah kemiskinan yang masih tinggi yakni Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk fakir miskin sebanyak 78.842 orang. Dari jumlah tersebut Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue menjadi salah satu Gampong yang menyumbang jumlah kemiskinan sebanyak 190 kepala keluarga (Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, 2020).

Tingginya jumlah masyarakat fakir miskin dilakukan karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial (pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan ketahanan pangan). Tentunya untuk memberdayakan tingkat kemiskinan di Kecamatan Suka Makmue khususnya di Gampong Lueng Baro

dibutuhkan peran serta berbagai pihak terutama peran Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin yang ada di Kabupaten Nagan Raya selaku instansi terkait yang mengurus segala masalah-masalah sosial ditengah masyarakat.

Tugas utama Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin diantaranya: melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, memperluas ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan profesionalisme aparatur yang berbasis kesejahteraan sosial. Program yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya bagi masyarakat fakir miskin di seluruh Kabupaten Nagan Raya diantaranya yaitu bantuan secara fisik berupa bantuan alat menjahit sebanyak 84 unit dan bantuan alat dan bahan membuat kue sebanyak 84 unit bantuan bibit dan alat pertanian sebanyak 95 unit. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya diketahui bahwa bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat adalah berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Kartu Indonesia Sejahtera serta bantuan modal usaha (Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, 2020).

Adapun masyarakat yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang berhak penerima program bantuan Dinas Sosial sebagaimana disebutkan Kementerian Sosial Republik Indonesia oleh (Sitepu, 2012) bahwa indikator fakir miskin terdiri dari beberapa, diantaranya:

1. Kondisi rumah dengan ciri kenis dinding terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plaster dan lantai bangunan tempat tinggal tanah/kayu murah.
2. Tempat tinggal dengan ciri numpang (tinggal bersama dalam satu rumah dengan keluarga lain) atau menepati sendiri rumah milik orang tua.
3. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau perkebunan lainnya dengan berpendapatan dibawah Rp 600.000 /per bulan;
4. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual seperti sepeda motor (kredit atau non kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya serta perabotan rumah tangga sangat minim.

Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok fakir miskin untuk melaksanakan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Dimana seharusnya fakir miskin secara bergilir mendapatkan bantuan yang diprogramkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya agar tercapai perubahan yang signifikan diwilayah tempat tinggalnya.

Salah satu cara yang banyak digunakan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui bantuan Pemerintah Pusat dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan perhatian khusus dalam upaya menanggulangi masalah ini yaitu dengan mengalokasikan sejumlah dana yang digunakan sebagai dana untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat miskin tersebut. Namun alokasi dana tersebut berupa bantuan dana langsung, dirasakan tidak efektif karena dari

masyarakat tersebut mempergunakan dana bantuan tersebut untuk keperluan yang lain, bukan untuk kebutuhan modal usaha yang dapat menunjang pendapatan bagi masyarakat miskin.

Oleh karena itu, diperlukan program pengentasan kemiskinan yang dapat menjangkau semua wilayah yang paling banyak penduduk miskinnya agar dapat partisipasi aktif dalam upaya mensukseskan pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial untuk melaksanakan program pemberdayaan terutama bagi fakir miskin sebagai target penerima sasaran dalam upaya menyelesaikan permasalahan pokok penyebab kemiskinan di perdesaan terutama di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya seperti kesejahteraan yang tidak merata. Hal dikarenakan bantuan pemberdayaan yang diterima fakir miskin tidak berkelanjutan.

Sebab dari jumlah penduduk di Desa Lueng Baro sebanyak 1.226 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 482 kepala keluarga diketahui terdapat 190 kepala keluarga yang berkategori fakir miskin, di mana meskipun masyarakat fakir miskin Desa Lueng Baro tersebut telah menerima bantuan dari Dinas Sosial seperti PKH sebanyak 53 keluarga dan BLT 14 keluarga diketahui masih kurang efektif meningkatkan ekonomi masyarakat fakir miskin. Disisi lain, fakir miskin di Desa Lueng Baro masih belum menerima bantuan seperti bantuan mesin jahit, peralatan pembuatan kue dan peralatan pertanian yang secara langsung sebenarnya lebih memberikan dapat langsung bagi kegiatan ekonomi masyarakat fakir miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hasil dari observasi yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat fakir miskin Desa Lueng Baro diketahui bahwa pemberdayaan yang



dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya masih adanya pemberdayaan yang tidak tepat sasaran (tidak sesuai indikator fakir miskin) atau penyaluran yang tidak merata secara keseluruhan dalam pemberdayaan bantuan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya kepada masyarakat yang masuk kategori fakir miskin. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian skripsi terkait **“Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”** untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan pemberdayaan di Gampong Lueng Baro.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimanakah ketepatan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

2. Mengetahui ketepatan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi para pembaca dan dapat menjadi sumber pengetahuan terkait dengan kondisi pemberdayaan masyarakat fakir miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti objek kajian yang serupa dengan penelitian peneliti.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait, dalam hal ini peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam memberdayakan fakir miskin di Kabupaten Nagan Raya khususnya di Desa Lueng Baro. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat terkait masih fenomena terjadinya penyaluran bantuan sosial yang kurang tepat sasaran, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kondisi fakir miskin di Desa Lueng Baro.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan tentang peran dinas sosial dalam pemberdayaan fakir miskin, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang diuraikan secara teoritis mengenai pengertian dan tujuan, serta peran dinas sosial dalam pemberdayaan fakir miskin
- BAB III : Metodologi Penelitian, Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian, Bab ini akan di paparkan berupa hasil temuan penelitian dilapangan berupa dokumentasi dan jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.
- BAB V : Pembahasan, Bab ini terdiri dari pembahasan serta hasil penelitian dari data-data yang diperoleh ketika melakukan penelitian.
- BAB VI : Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan akhir dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai peran dinas sosial dalam pemberdayaan fakir miskin sebelumnya sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun dalam penelitian ini peneliti mengkaji dari perspektif yang berbeda. Adapun penelitian yang serupa dengan penelitian penulis, diantaranya penelitian yang membahas upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha yang fokus kepada strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Dewi Puspitasari, 2020).

Penulis juga merujuk penelitian terdahulu yang membahas pemberdayaan fakir miskin, yang membentuk program penanganan fakir miskin melalui kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (Duwi Reknani, 2015), kemudian pemberdayaan fakir miskin dalam pengentasan kemiskinan melalui program usaha ekonomi produktif dan KUBE (Nurma Rifatun Hasanah, 2019). Berikutnya, penulis merujuk penelitian terkait dengan strategi Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui kartu menuju sejahtera (Rima Fitriani, 2013), Terakhir rujukan penelitian penulis juga tertuju pada efektivitas bantuan dana tunai program PKH dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Ririn Anjela, 2019).

Berdasarkan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis dengan penelitian sebelumnya. Adapun kesamaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu yakni terdapat pada focus kajian penelitian yang sama-sama meneliti terkait peran Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin. Sementara dari segi perbedaannya yakni terletak pada pemilihan fokus penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat fakir miskin dan jenis bantuan yang disalurkan kepada masyarakat fakir miskin, serta melihat kebijakan regulasi dan strategis yang di ambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

## **2.2 Konsep Peran**

### **2.2.1 Pengertian Peran**

Peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya maka hal ini dapat dikatakan individu tersebut menjalankan suatu peran. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat maka adanya suatu harapan-harapan baru. (Abdulsyani, 2007, h. 94). Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi sosial dalam masyarakat. Peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang dapat membimbing seorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.



3. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2006, h. 212).

Peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Menurut Gros, Mason dan Macheren mendefinisikan bahwa peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

### **2.2.2 Peran Dinas Sosial**

Dinas sosial adalah instansi pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Adapun peran dari Dinas Sosial secara umum adalah sebagai berikut:

1. Berperan melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Berperan aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Berperan memperluas ketahanan sosial masyarakat.
4. Berperan meningkatkan profesionalisme aparatur berbasis kesejahteraan sosial.
5. Berperan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat fakir miskin.

Sedangkan peran Dinas Sosial secara khusus di dalam pemberdayaan masyarakat miskin pada suatu daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berperan menyusun dan mempersiapkan rencana pemberdayaan fakir miskin.

Pada tahapan ini, Dinas sosial menyusun rencana kegiatan pemberdayaan sesuai ketentuan dan perundang-undangan disertai dengan mengarahkan unit kerja atau bidang kerja Dinas Sosial untuk mendata kebutuhan masyarakat fakir miskin,

2. Berperan mensosialisasikan program-program pemberdayaan fakir miskin.

Pada tahapan ini, setelah rencana pemberdayaan fakir miskin disusun dan dipersiapkan dengan baik, selanjutnya Dinas Sosial berperan mensosialisasikan program-program tersebut kepada tingkat kecamatan dan desa yang mana pada tingkat tersebut, Dinas Sosial meminta agar dilakukan pendataan masyarakat fakir miskin untuk selanjutnya diberikan sosialisasi bahwasannya masyarakat fakir miskin yang terdata tersebut dinyatakan akan mendapatkan pemberdayaan dari Dinas Sosial.

3. Berperan melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin.

Pada tahapan ini, Dinas sosial berperan melaksanakan berbagai kegiatan atau program pemberdayaan fakir miskin berupa memberikan bantuan sosial baik secara tunai maupun non tunai kepada masyarakat fakir miskin yang sebelumnya telah terdata pada tingkat Kecamatan dan Desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial tidak jauh beda dengan peran pekerjaan sosial, yaitu membantu masyarakat secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Di dalam Peran Dinas sosial ini, ada program pemerintah yang dapat langsung dikerjakan oleh Dinas Sosial.

## **2.3. Konsep Pemberdayaan**

### **2.3.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan upaya pembangunan kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui pengembangan kelembagaan sosial, sarana dan prasarana serta pengembangan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Pendampingan yang dilakukan berupa menggerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat (Vitayala dalam Zubaedi, 2013, h. 79).

Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan pada setiap individu merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari keinginan pada diri masyarakat untuk berubah dan memperbaiki kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari hambatan-hambatan yang dirasakan untuk mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan yang diharapkan. Mengembangkan kemauan dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Peningkatan peran atau partisipasi kegiatan pemberdayaan dalam efektivitas dan efisiensi untuk peningkatan kompetensi melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan (Wilson dalam Poerwoko dan Totok, 2012, h. 122).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dalam arti sesungguhnya merupakan sebuah proses dan tujuan pemberdayaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk memperkuat kemandirian kelompok kurang

mampu yang ada pada masyarakat fakir miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan mengarah pada hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial.

### **2.3.2 Tujuan dan Pendekatan Pemberdayaan**

Tujuan utama pemberdayaan yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya kelompok kurang mampu, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu mempunyai pengetahuan dan kemauan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik bersifat fisik, ekonomi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan kehidupannya. Tujuan lainnya pemberdayaan adalah untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan, serta meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomiannya (Suhartini dkk, 2011, h. 7-8).

Berkaitan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan (Suharto, 2006, h. 67), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemungkiman, menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari kultural dan struktur yang menghambat.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam upaya memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kemampuan dan kepercayaan diri kelompok masyarakat yang menunjang kemampuan diri mereka. Dengan upaya mengembangkan kapasitas masyarakat melalui

bantuan peningkatan ketarampilan dan pengetahuan. Penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, dan memberikan pendapatan yang layak.

3. Perlindungan, upaya melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok kurang mampu untuk mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan pihak yang lemah.
4. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat dapat dan mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Memelihara kondisi yang lebih kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka terkait dengan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu syarat utama menuju suatu berkelanjutan baik secara ekonomi dan sosial yang dinamis, serta menuju kepada sebuah kemandirian masyarakat dan keberhasilan pemberdayaan juga dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang sebelumnya belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

#### **2.4 Konsep Fakir Miskin**

Menurut Arsyad (2013, h. 10) kemiskinan adalah terjadinya kekurangan modal. Masalah kekurangan modal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep lingkaran tak berujung pangkal (*vicious circle*). Kekurangan modal ini disebabkan oleh rendahnya investasi, sedang rendahnya investasi disebabkan oleh



rendahnya pendapatan, sedangkan masih rendahnya pendapatan karena tingkat produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, sumber daya alam dan modal. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh keterbelakangan penduduk, belum dimanfaatkannya sumber daya alam secara optimal.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

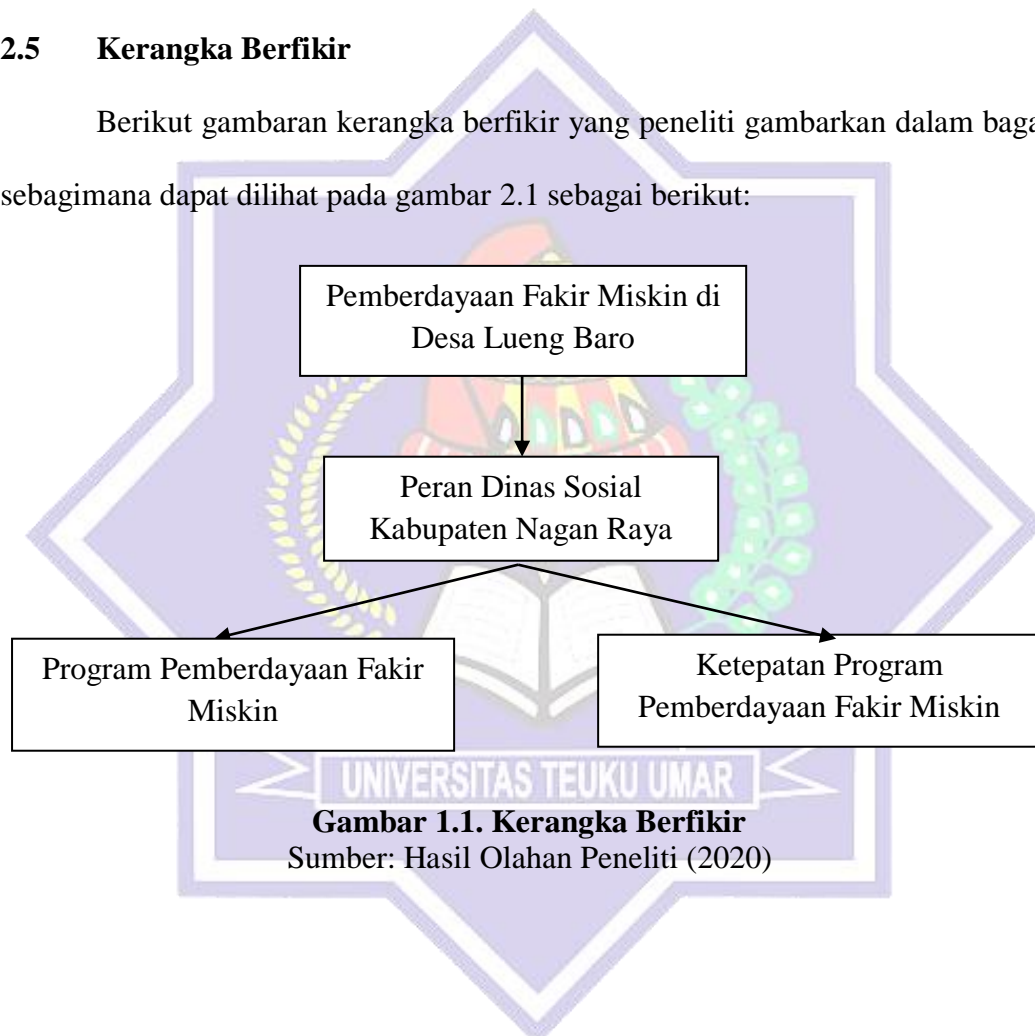
Kemiskinan Absolut dan Relatif (Arsyad, 2013, h. 12).

1. Kemiskinan Absolut, yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atas kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Seseorang yang mempunyai pendapatan dibawah kebutuhan minimum, maka orang tersebut dikatakan miskin.
2. Kemiskinan Relatif, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidak merataan. Dalam kemiskinan relatif ini seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak

miskin. Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan yang lebih rendah, maka orang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin. Dengan kata lain kemiskinan ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut tinggal.

## 2.5 Kerangka Berfikir

Berikut gambaran kerangka berfikir yang peneliti gambarkan dalam bagan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Kerangka Berfikir**  
Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2020)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengkalifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan fakta yang ada dengan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan dipahami (Faisal, 2010, h. 20).

#### **3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **3.2.1. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti baik dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi (Sugiyono, 2014, h. 225). Dalam penelitian ini data primer yang didapat melalui teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu masalah dalam penelitian kepada informan yang telah ditentukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, artinya sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data

(Sugiyono, 2014, h. 225). Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa surat kabar, website, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, dan referensi-referensi yang berkenaan.

### 3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang dijelaskan oleh (Creswell, 2016, h. 27) diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan berupa pengamatan yang bersifat *open-ended*. Dalam hal ini, penulis dapat mengajukan pertanyaan umum yang ingin diketahui terkait persoalan yang akan diteliti. Penulis melakukan kegiatan ini dengan cara mengamati langsung perilaku serta aktivitas-aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan baik secara langsung ataupun melalui perantara seperti telepon. Kegiatan ini melibatkan dua belah pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang menjawab pertanyaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memunculkan opini dari para partisipan.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen baik yang bersifat publik seperti artikel, laporan, dan koran maupun dokumen yang bersifat privat seperti buku harian, *e-mail*, dan surat.

### 3.3 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan informan secara *purposive sampling* (sengaja) sebagai teknik penentuan informan dengan pertimbangan kesesuaian dengan konteks permasalahan dengan penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2014, h. 72). Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari:

**Tabel 3.1. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Asmaul Husna, SE (Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinsos Nagan Raya)	1 orang
2.	Hasan, SE (Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial Dinsos Nagan Raya)	1 orang
3.	Keuchik Gampong Lueng Baro	1 orang
4.	Masyarakat Gampong Lueng Baro	4 Orang
	Jumlah	7 Orang

### 3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti sebagai sarana penunjang dalam melakukan penelitian sehingga dapat terkumpul semua data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel yang berubah seiring dengan berjalannya penelitian, sehingga hasil penelitiannya tidak dapat ditentukan dengan pasti.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data secara keseluruhan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Milles dan Huberman (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono (2014, h. 291) mengemukakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi 3 diantaranya :



### 1. Redukasi data

Redukasi data merupakan kegiatan penyeleksian terhadap data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian dengan memfokuskan kepada hal yang dirasa penting dan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai penulis serta menyingkirkan data-data yang tidak perlu.

### 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan penulis dengan cara menarasikan data yang telah di redukasi baik yang disajikan dalam bentuk teks naratif, grafik, tabel maupun bagan yang mengantarkan peneliti kepada proses analisis dan penarikan simpulan penelitian.

### 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Setelah data redukasi dan disajikan, maka langkah yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap awal kegiatan ini data masih bersifat sementara dan sangat ditentukan dengan adanya bukti yang kuat. Kesimpulan penelitian baru dapat dinyatakan kredibel jika bukti yang kuat sudah didapatkan pada proses pengumpulan data.

## **3.6 Pengujian Kredibilitas Data**

Kredibilitas data merupakan pengujian kehandalan data yang diperoleh di lapangan yang sangat penting diperhatikan dalam penelitian kualitatif, untuk melihat kebenaran atas temuan-temuan yang didapatkan. Pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2014, h. 199-122) dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

### 1. Melakukan Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat dilakukan peneliti dengan cara kembali ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan informan lainnya atau membaca banyak studi literatur.

### 2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dilakukan peneliti dengan cara melakukan kajian kembali atas penelitian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data-data yang telah diperoleh sudah tetap disajikan dalam hasil penelitian.

### 3. Triangulasi Teknik

Agar data-data penelitian lebih handal dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti dapat menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan melakukan studi observasi dan studi dokumentasi sebagai cara untuk memastikan kebenaran data wawancara penelitian yang diperoleh dari narasumber.

### 4. Analisis Data Kasus Negatif

Data kasus negatif merupakan tindakan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang bertentangan dari data hasil penelitian di lapangan, yang mana bila tidak ada perbedaan pada kedua data tersebut, maka hasil penelitian yang dilakukan telah handal dan dapat dipercaya.

## **3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan lama waktu penelitian sekitar 4 bulan. Adapun rincian waktu pelaksanaan penelitian akan dijelaskan dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan Waktu	Maret	April	Mei	Juni
1	Observasi lapangan	√			
2	Usulan penelitian	√			
3	Penulisan proposal		√		
4	Seminar proposal		√		
5	Pengumpulan data			√	
6	Pengolahan data			√	
7	Penulisan hasil			√	
8	Seminar hasil				√
9	Sidang skripsi				√



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Leung Baro merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk mencapai 1.226 jiwa terdiri dari 600 jiwa penduduk laki-laki dan 626 jiwa penduduk perempuan yang tersebar pada 5 (lima) dusun yaitu Dusun Indra Puri, Dusun Cot Bakjok, Dusun Padang Aweret, Dusun Paya Teuladan, Dusun Cot Rundeng. Terkait jumlah penduduk pada masing-masing dusun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Dusun di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dusun Indra Puri	111	124	235
2	Dusun Cot Bakjok	96	101	197
3	Dusun Padang Aweret	68	79	147
4	Dusun Paya Teuladan	180	174	354
5	Dusun Cot Rundeng	143	150	293
	Total	600	626	1.226

Sumber: Kantor Desa Lueng Baro Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari 1.226 jiwa penduduk yang berada di Desa Lueng Baro yang terdiri dari 600 jiwa penduduk laki-laki dan 626 jiwa penduduk perempuan diketahui Dusun Paya Teuladan merupakan dusun yang memiliki jumlah penduduk paling banyak berjumlah 354 jiwa terdiri dari 180 jiwa penduduk laki-laki dan 174 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada dusun Padang Aweret berjumlah 147 jiwa terdiri dari 68 jiwa penduduk laki dan 79 jiwa penduduk perempuan.

Adapun berkaitan dengan jumlah penduduk yang berkategori fakir dan miskin yang terdapat pada masing-masing dusun di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Dusun di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya

No	Nama Dusun	Kepala Keluarga		Jumlah
		Fakir	Miskin	
1	Dusun Indra Puri	7	32	39
2	Dusun Cot Bakjok	27	12	39
3	Dusun Padang Aweret	21	17	38
4	Dusun Paya Teuladan	9	17	26
5	Dusun Cot Rundeng	5	42	47
	Total	69	120	189

Sumber: Kantor Desa Lueng Baro Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas meunjukkan pada Desa Lueng Baro terdapat 189 Kepala Keluarga yang berkategori fakir miskin terdiri dari kelompok fakir sebanyak 69 Kepala Keluarga dan Miskin sebanyak 120 Kepala Keluarga. Dari tabel tersebut juga diketahui jumlah fakir miskin terbanyak pada Desa Lueng Baro terdapat di Dusun Cot Rundeng sebanyak 47 Kepala Keluarga yang terdiri dari kelompok fakir sebanyak 5 Kepala Keluarga dan 42 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk fakir miskin paling sedikit terdapat di Dusun Paya Teuladan berjumlah 26 jiwa terdiri dari kelompok fakir sebanyak 9 Kepala Keluarga dan kelompok miskin sebanyak 17 Kepala Keluarga.



## **4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya**

Sebagaimana terdapat Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya bahwasannya tugas dan fungsi Dinas Sosial di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

### **4.2.1. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya**

Secara umum Dinas Sosial bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan strukturalnya maka tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas Sosial**

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

#### **2. Sekretariat Dinas Sosial**

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan administrasi bagian keuangan.
- c. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Sosial.

- a. Seksi Pelayanan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas memimpin seksi Pelayanan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas memimpin seksi Jaminan Sosial Keluarga dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

### 4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Sosial.

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia melaksanakan tugas memimpin seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Rehabilitasi Sosial.
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melaksanakan tugas memimpin seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Rehabilitasi Sosial.
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melaksanakan tugas memimpin Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Rehabilitasi Sosial.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan
- Mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangundangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Sosial.
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial melaksanakan tugas memimpin Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

- b. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas melaksanakan tugas memimpin Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.
- c. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan melaksanakan tugas memimpin Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

#### **4.2.2. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya**

Secara umum fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya adalah Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas, Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, Penyusunan kebijakan teknis dibidang Sosial, Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Sosial, Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Sosial, Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang sosial, Pembinaan UPTD dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi daripada masing-masing jabatan yang terdapat dalam Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas
  - c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan
  - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan
  - e. Menilai prestasi kerja bawahan
  - f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota
  - g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum
  - h. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan
  - j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis
  - k. Melaksanakan sistem pengendalian internal
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
  - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
2. Sekretariat
- Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana
  - b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala
  - c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan



- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas
- g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga
- e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan masyarakat
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial terkait kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial
- e. pelaksanaan norma, standar dan prosedur pemberdayaan sosial
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan
- h. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara
- i. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota
- j. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **4.3. Hasil Penelitian**

#### **4.3.1. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya**

##### **4.3.1.1. Peran Dinas Sosial Dalam Menyusun Rencana Pemberdayaan Fakir Miskin**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam menyusun rencana pemberdayaan fakir miskin, Asmaul Husna selaku Kabid Pemberdayaan dan Penangan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwa:

Penyusunan program pemberdayaan masyarakat fakir miskin yang oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sebenarnya tergantung dari arahan pemerintah dan kementerian terkait, karena terkait dengan program tersebut diselenggarakan secara nasional terutama program BLT, KIS dan PKH. Demikian halnya dengan bantuan seperti peralatan dan modal usaha juga berasal dari Kementerian terkait di mana kita sebagai satuan kerja pemerintah daerah hanya mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat menganggarkan biaya yang diperlukan untuk melaksanakannya pada tingkat daerah setelah pihak Dinas Sosial melakukan pendataan jumlah fakir miskin yang terdapat di seluruh Kabupaten Nagan Raya (Wawancara, 23 Juni 2021).

Senada dengan wawancara di atas bahwa mengenai peran Dinas Sosial dalam menyusun rencana pemberdayaan fakir miskin, Hasan selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam wawancara penelitian ini mengatakan sebagai berikut:

Penyusunan rencana pemberdayaan fakir miskin dilakukan sesuai dengan program pada Pemerintah Provinsi atau Kementerian terkait. Sedangkan usulan dari program pemberdayaan yang menjadi program Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya disusun sesuai rencana strategis pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Mengenai persiapan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan pihak Dinas Sosial dengan menjalin koordinasi bersama camat pada tingkat kecamatan dan berlanjut hingga ke tingkat desa (Wawancara, 24 Juni 2021).

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat fakir miskin dilakukan sesuai dengan rencana strategis pemberdayaan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang disusun oleh aparatur atau pegawai Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya yang mana seluruh program pemberdayaan yang disusun tersebut merupakan bagian daripada arahan pemerintah dan kementerian terkait, karena program-program pemberdayaan fakir miskin terutama program BLT, KIS dan PKH diselenggarakan secara nasional.

Terkait dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam hal menyusun rencana pemberdayaan fakir miskin khususnya di Desa Lueng Baro, ditanggapi informan lain yaitu Zulkhaidir selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lueng Baro yang dalam hal ini mengatakan bahwa:

Mengenai penyusunan rencana pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, secara umum dilakukan Dinas Sosial secara bertahap yaitu mulai dari berkoordinasi dengan Pemerintah Desa sehingga aparatur Desa ini pada tahapan ini melakukan pendataan masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir miskin tersebut untuk seterusnya akan disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya (Wawancara, 25 Juni 2021).

Kemudian dalam wawancara selanjutnya yang telah penulis lakukan kepada informan fakir miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro, bahwa berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam menyusun pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro dikatakan oleh Mariamah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:

Masalah penyusunan rencana pemberdayaan fakir miskin oleh Dinas Sosial, kami selaku masyarakat yang menerima bantuan dari Dinas Sosial tidak tahu bagaimana masalah tersebut, tetapi yang pasti aparatur Desa Leung



Baro sebelum kami menerima bantuan melakukan pendataan terlebih dahulu kepada warganya (Wawancara, 26 Juni 2021).

Tanggapan senada mengenai peran Dinas Sosial dalam menyusun rencana pemberdayaan fakir miskin turut disampaikan oleh informan selanjutnya yaitu Nursawati selaku penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif dalam bentuk peralatan kelontongan di Desa Lueng Baro mengatakan bahwa:

Berkenaan peran Dinas Sosial Kabupten Nagan Raya dalam menyusun dan mempersiapkan pemberdayaan fakir miskin, menurut saya aparatur Desa yang lebih mengetahuinya karena kami selaku masyarakat hanya diberi tahu oleh apatur Desa bahwasannya kami mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial semenjak awal dilakukan pendataan (Wawancara, 26 Juni 2021).

Dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan mengenai peran Dinas Sosial dalam menyusun rencana pemberdayaan fakir miskin, dikemukakan oleh Aminah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan sebagai berikut:

Penyusunan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sebelum kegiatan pemberdayaan dilakukan tidak banyak kami ketahui karena kami hanya masyarakat biasa yang didata sebagai penerima bantuan dari Dinas Sosial. Menurut saya yang lebih banyak mengetahui masalah penyusunan dan persiapan pemberdayaan tersebut adalah dari pihak Dinas Sosial itu sendiri atau aparatur desa yang mendata fakir miskin di Desa Lueng Baro (Wawancara, 27 Juni 2021).

Hasil wawancara mengenai peran Dinas Sosial dalam menyusun rencana pemberdayaan fakir miskin turut disampaikan oleh informan selanjutnya yaitu Nursyahwan selaku penerima PKH di Desa Lueng Baro yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:

Yang saya ketahui mengenai penyusunan dan persiapan Dinas Sosial dalam kegiatan pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro adalah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menerima bantuan dari

Dinas Sosial, namun hal tersebut dilakukan oleh aparaturnya Desa Lueng Baro dan ketika kami terdata sebagai penerima bantuan, yang memberitahu hal tersebut juga aparaturnya Desa Lueng Baro (Wawancara, 27 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang telah disampaikan oleh informan di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan para informan selalu masyarakat fakir miskin yang mendapat bantuan pemberdayaan dari Dinas Sosial hanya tahu sedikit terkait dengan penyusunan rencana program pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro diantaranya adalah pendataan masyarakat melalui aparaturnya yang berhak menerima bantuan pemberdayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

#### **4.3.1.2. Peran Dinas Sosial Dalam Menyiapkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam mempersiapkan program pemberdayaan fakir miskin, Asmaul Husna mengatakan bahwa:

Sebelum program pemberdayaan diberikan kepada masyarakat fakir miskin, bahwasannya Dinas Sosial terlebih dahulu mempersiapkan tahap-tahap pelaksanaan pemberdayaan, misalnya dengan melakukan pengecekan kembali data-data fakir miskin, bekerjasama dengan pihak Bank atau pemerintah sebagai penyalur bantuan program (Wawancara, 23 Juni 2021).

Senada dengan wawancara di atas bahwa mengenai peran Dinas Sosial dalam mempersiapkan program pemberdayaan fakir miskin, Hasan dalam wawancara penelitian ini mengatakan sebagai berikut:

Persiapan yang dilakukan Dinas Sosial sebelum program pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan adalah mempersiapkan seluruh bahan-bahan sosialisasi, waktu sosialisasi dan tempat sosialisasi kepada masyarakat apabila bantuan tersebut berasal dari dinas sosial. Namun apabila program tersebut dari Pemerintah atau Kementerian terkait, maka pihak Dinas Sosial cukup mempersiapkan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam

penyaluran bantuan program pemberdayaan fakir miskin (Wawancara, 24 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang disampaikan informan di atas, maka mengenai masalah persiapan program pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya adalah mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi dan melakukan pengecekan kembali data fakir miskin serta bekerjasama dengan pihak Bank atau pemerintah sebagai penyalur bantuan program. Adapun terkait dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam mempersiapkan program pemberdayaan fakir miskin khususnya di Desa Lueng Baro, ditanggapi informan lain yaitu Zulkhaidir yang dalam hal ini mengatakan bahwa:

Persiapan program yaitu dari pihak Pemerintahan Gampong yang mendata turut diberitahukan bahwa program sudah dipersiapkan setelah pengecekan data fakir miskin yang berhak menerima program bantuan, yang mana dalam persiapan tersebut, pihak aparat gampong diminta untuk segera mempersiapkan sosialisasi kepada masyarakat yang menerima bantuan program pemberdayaan fakir miskin (Wawancara, 25 Juni 2021).

Kemudian dalam wawancara selanjutnya yang telah penulis lakukan kepada informan fakir miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro, bahwa berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam mempersiapkan pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro dikatakan oleh Mariamah selaku penerima BLT, Nursawati selaku penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif dalam bentuk peralatan kelontongan, Aminah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro dan Nursyahwan selaku penerima PKH di Desa Lueng Baro yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa secara umum tidak mengetahui mengenai persiapan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

#### **4.3.1.3. Peran Dinas Sosial Dalam Mensosialisasikan Program Pemberdayaan Fakir Miskin**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan fakir miskin, Asmaul Husna mengatakan bahwa:

Mengenai sosialisasi program-program pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan mulai dari tingkat satuan kerja pemerintah daerah, kecamatan dan desa hingga ke masyarakat juga diberikan peluang untuk memberikan informasi mengenai data kemiskinan yang terdapat di desa masing-masing. Berkaitan dengan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat miskin dilakukan oleh Dinas Sosial melalui kecamatan hingga ke tingkat desa, agar kedua pihak yang bersangkutan tersebut saling bekerjasama untuk memberikan informasi bagi masyarakat fakir miskin bahwa yang bersangkutan telah menerima bantuan dari pemerintah (Wawancara, 23 Juni 2021).

Tanggapan senada yang disampaikan informan sebelumnya di atas terkait peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan fakir miskin, turut dikemukakan oleh Hasan yang mengatakan bahwa:

Sosialisasi program dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dengan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan berupa bantuan tunai dan non tunai tersebut benar-benar diterima langsung oleh masyarakat fakir miskin (Wawancara, 24 Juni 2021).

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh para informan di atas dapat diketahui bahwasanya dalam menjalankan perannya sebagai institusi yang memiliki tugas dan wewenang untuk mensosialisasikan program pemberdayaan pada tingkat Kecamatan dan Desa, Dinas sosial Kabupaten Nagan Raya secara umum telah melaksanakan sosialisasi program-program pemberdayaan fakir miskin mulai dari tingkat satuan kerja pemerintah daerah, kecamatan dan desa hingga kepada masyarakat juga diberikan peluang untuk memberikan informasi



mengenai data kemiskinan yang terdapat di desa masing-masing yang menjadi sasaran daripada program pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

Tanggapan yang lainnya berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan fakir miskin khususnya di Desa Lueng Baro, turut dikemukakan oleh Zulkhaidir yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sifatnya tidak formal, karena kami dari pihak Pemerintah Desa hanya menerima surat bahwasannya kami dihimbau oleh Dinas Sosial untuk dapat memberitahukan kepada masyarakat fakir miskin bahwasannya mereka masyarakat fakir miskin telah menerima bantuan pemberdayaan dan dapat diambil langsung ke Dinas apabila bantuan tersebut adalah bantuan non tunai ataupun melalui lembaga terkait yang ditunjukkan oleh Dinas apabila bantuan tersebut sifatnya bantuan tunai (Wawancara, 25 Juni 2021).

Sedangkan dalam wawancara lainnya yang telah penulis lakukan kepada informan selanjutnya bahwasanya berkenaan dengan peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan fakir miskin, dikemukakan oleh Mariamah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:

Sosialisasi mengenai bantuan pemberdayaan masyarakat kami terima dari aparatur Desa Lueng Baro bukan dari Dinas Sosial. Tetapi bantuan yang disosialisasikan oleh aparatur desa tersebut merupakan bantuan yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya (Wawancara, 26 Juni 2021).

Tanggapan senada dalam wawancara yang telah penulis lakukan terkait peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan fakir miskin juga disampaikan oleh Nursawati selaku penerima bantuan modal usaha



ekonomi produktif dalam bentuk peralatan kelontongan di Desa Lueng Baro yang mengatakan bahwa:

Dinas sosial tidak mensosialisasikan langsung bantuan pemberdayaan yang diterima oleh fakir miskin Desa Leung Baro, tetapi sosialisasi tersebut dilakukan melalui aparatur Desa Lueng Baro, meskipun bantuan yang didapat tersebut nantinya juga diambil fakir miskin di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya (Wawancara, 26 Juni 2021).

Kemudian dalam wawancara lebih lanjut yang penulis lakukan berkenaan dengan peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program pemberdayaan fakir miskin, Aminah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro mengatakan:

Terkait dengan sosialisasi mengenai bantuan pemberdayaan kepada fakir miskin tidak secara langsung disampaikan oleh pihak Dinas Sosial, tetapi sosialisasi tersebut dilakukan dan kami terima dari aparatur Desa Lueng Baro (Wawancara, 27 Juni 2021).

Hasil wawancara senada berkenaan dengan peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program pemberdayaan fakir miskin, turut disampaikan oleh Nursyahwan selaku penerima PKH di Desa Lueng Baro yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:

Dinas Sosial Kaubupaten Nagan Raya semenjak saya menerima bantuan pemberdayaaan yaitu dari program PKH belum pernah memberikan sosialisasi masalah bantuan tersebut, yang ada hanya dari pendamping atau dari aparatur desa ketika saya diberitahukan setiap akan ada pemasukan dana bantuan dari program PKH (Wawancara, 27 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat fakir miskin Desa Lueng Baro, belum pernah mendapatkan sosialisasi pemberdayaan masyarakat fakir miskin secara langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, tetapi sosialisasi tersebut banyak diterima masyarakat fakir miskin dari aparatur Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

#### **4.3.1.4. Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro, Asmaul Husna mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin dilakukan Dinas Sosial Kabupaten sesuai dengan mekanisme atau petunjuk pelaksanaan program pemberdayaan itu sendiri baik mekanisme yang telah disusun oleh pemerintah ataupun kementerian terkait maupun yang disusun oleh Dinas Sosial itu sendiri. Kedua mekanisme itu pada prinsipnya sama, karena dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial dengan berkoordinasi pada pihak Kecamatan maupun pihak Pemerintahan Desa (Wawancara, 23 Juni 2019).

Dalam wawancara selanjutnya yang telah penulis lakukan kepada Hasan berkaitan dengan peran Dinas Sosial di dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro, Hasan mengatakan sebagai berikut:

Peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya secara umum dalam kegiatan pemberdayaan fakir miskin yang berada di Kabupaten Nagan Raya adalah mengarahkan pelaksana kegiatan seperti Camat maupun Keuchik agar kedua pihak tersebut saling berkoordinasi dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial agar bantuan tersebut tepat sasaran dan benar telah diterima oleh yang berhak menerima sesuai dengan data yang terdata atau data yang diberikan Kecamatan maupun Desa kepada Dinas Sosial (Wawancara, 24 Juni 2021).

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan program pemberdayaan pada masyarakat fakir miskin menunjukkan bahwasanya pelaksanaan program pemberdayaan tersebut dilakukan Dinas Sosial sesuai dengan mekanisme atau petunjuk pelaksanaan program pemberdayaan itu sendiri baik mekanisme yang telah disusun oleh pemerintah ataupun kementerian terkait.

Dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan, terkait dengan ketiga peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan fakir miskin bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Dinas Sosial sebelum kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan diantaranya perlunya pendamping pemberdayaan bagi masyarakat fakir miskin yang diberdayakan. Hal ini sebagaimana wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan kebutuhan fakir miskin yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Asmaul Husna mengatakan bahwa:

Menyangkut dengan kebutuhan pihak fakir miskin yang penting untuk dapat diperhatikan sebenarnya adalah pendampingan dari berbagai pihak terutama pihak desa yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat fakir miskin di desa bersangkutan, di samping pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial itu sendiri. Dengan pendampingan, maka setiap kebutuhan fakir miskin akan terlihat jelas apa yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari tingkat desa hingga pemerintah daerah terkait penyelesaian masalah kesejahteraan fakir miskin (Wawancara, 23 Juni 2021).

Dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan berkaitan dengan kebutuhan fakir miskin yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Hasan mengatakan sebagai berikut:

Kebutuhan yang mutlak diperlukan agar masyarakat fakir miskin yang telah menerima bantuan dari Dinas Sosial, menjadi mandiri adalah dengan cara mendampingi fakir miskin bersangkutan, karena tanpa ada pihak yang mendampingi, maka bantuan tersebut bisa jadi dipergunakan penerimanya untuk hal-hal yang tidak produktif (Wawancara, 24 Juni 2021).

Adapun dalam wawancara selanjutnya yang telah penulis lakukan terhadap Zulkhairi berkaitan dengan kebutuhan fakir miskin yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, diperoleh informasi sebagai berikut:

Banyak hal yang dibutuhkan oleh fakir miskin terkait dengan masalah pemberdayaan, yang paling bukan bantuannya tetapi pendampingan bagi fakir miskin yang telah menerima bantuan agar mereka dibimbing oleh

pendamping agar bantuan yang diterima tersebut, misal bantuan tunai itu, tidak dikonsumsi, namun bantuan tunai tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat kegiatan produktif, seperti tambahan modal usahanya atau lain sebagainya, sehingga fakir miskin menjadi mandiri secara ekonomi (Wawancara, 25 Juni 2021).

Tanggapan yang disampaikan oleh informan tersebut di atas didukung oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat fakir miskin yang dalam hal ini yaitu Mariamah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:

Kegiatan pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, menurut saya sudah terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat, dikarenakan pihak Dinas Sosial sudah memberi bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat fakir miskin (Wawancara, 26 Juni 2021).

Sedangkan dalam wawancara selanjutnya yang penulis lakukan kepada Nursawati selaku penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif dalam bentuk peralatan kelontongan di Desa Lueng Baro terkait dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin, Nursawati dalam hal ini mengatakan bahwa:

Peran dinas sosial dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat fakir miskin sudah berlangsung dengan baik, dikarenakan dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi penerimanya, sebab dengan bantuan yang diberikan tersebut, telah membantu masyarakat fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wawancara, 26 Juni 2021).

Adapun dalam wawancara lebih lanjut yang telah penulis lakukan kepada Aminah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro terkait dengan permasalahan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin, Aminah mengatakan sebagai berikut:



Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dinas Sosial melalui bantuan yang diberikan kepada fakir miskin, sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat fakir miskin, yang terkait dengan hal tersebut menurut saya Dinas Sosial sudah berperan dengan sangat baik dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat fakir miskin termasuk pada Desa Lueng Baro (Wawancara, 27 Juni 2021).

Tanggapan lainnya berkenaan dengan permasalahan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin, turut disampaikan oleh Nursyahwan selaku penerima PKH di Desa Lueng Baro yang dalam wawancara penelitian mengatakan bahwa:

Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat fakir miskin khususnya di Desa Lueng Baro sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan fakir miskin, dikarenakan bantuan yang telah diberikan pun sangat bermanfaat dan membantu kebutuhan masyarakat fakir miskin (Wawancara, 27 Juni 2021).

Dari wawancara yang disampaikan oleh para informan tersebut di atas bahwa berkenaan dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan fakir miskin secara keseluruhan didapatkan informasi yaitu Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya selama ini telah menjalankan perannya dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat fakir miskin.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan fakir miskin, Asmaul Husna mengatakan bahwa:

Secara umum kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya di dalam pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin adalah kurangnya anggaran yang tersedia untuk memaksimalkan kegiatan tersebut untuk terus berkelanjutan (Wawancara, 23 Juni 2021).



Senada dengan wawancara tersebut di atas, Hasan dalam wawancara yang penulis telah lakukan terkait dengan dengan kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan fakir miskin, mengatakan sebagai berikut:

Terdapat 2 (dua) hal yang masih menjadi kendala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat fakir miskin. Yang pertama, adalah masalah ketersediaan anggaran yang alokasinya belum tentu diusulkan ditingkat legislatif atau usulan anggaran kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan target penerimaan. Yang kedua, adalah terkait pendataan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan terkadang masih kurang valid, sehingga tidak jarang ditemukan masalah adanya masyarakat fakir miskin yang tidak menerima bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya (Wawancara, 24 Juni 2021).

Dalam wawancara lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana pendapat Zulkhaidir selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Lueng Baro yang dalam hal ini menggantikan informan Keuchik bahwa perihal kendala-kendala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro, didapatkan informasi sebagai berikut:

Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, menurut saya sudah menjalankan perannya dengan sangat baik dalam memberdayakan fakir miskin pada masyarakat, karena setiap informasi mengenai bantuan yang diterima oleh masyarakat sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa sehingga pihak aparat desa pun bisa mendata masyarakat fakir miskin yang berhak menerima bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, meskipun dalam pelaksanaannya tentunya Dinas Sosial itu sendiri terdapat kendala yang sebenarnya terkait dengan anggaran pemberdayaan yang masih minim (Wawancara, 25 Juni 2021).

Tanggapan yang disampaikan informan tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama ini terkait dengan kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan fakir miskin diantaranya adalah masalah ketersediaan anggaran yang alokasinya belum tentu diusulkan ditingkat

legislatif atau usulan anggaran kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan target penerimaan dan terkait pendataan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan terkadang masih kurang valid, sehingga tidak jarang ditemukan masalah adanya masyarakat fakir miskin yang tidak menerima bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya

#### **4.3. Ketepatan Pemberdayaan Fakir Miskin Yang Dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan program-program yang telah dilaksanakan Dinas Sosial dalam kegiatan pemberdayaan fakir miskin, Asmaul Husna mengatakan bahwa:

Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya diantaranya pemberdayaan melalui bantuan tunai seperti Program keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, bantuan modal usaha. Sedangkan bantuan non tunai diantaranya bantuan peralatan menjahit, bantuan peralatan pertanian, peralatan peralatan membuat kue dan bantuan bibit tanaman untuk petani (Wawancara, 23 Juni 2021).

Hasil wawancara senada berkaitan dengan program-program yang telah dilaksanakan Dinas Sosial dalam kegiatan pemberdayaan fakir miskin, turut disampaikan oleh Hasan yang dalam wawancara penelitian mengatakan bahwa:

Mengenai bantuan sudah banyak sekali diberikan kepada masyarakat fakir miskin mulai dari bantuan tunai seperti BLT, PKH, KIS dan modal usaha serta bantuan non tunai berupa bantuan peralatan pembuatan kue, peralatan pertanian, mesin jahit dan lain sebagainya guna mendukung produktivitas masyarakat fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan (Wawancara, 24 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan ketepatan program pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Sosial terhadap fakir miskin, Asmaul Husna mengatakan bahwa:

Bantuan yang diberikan bagi fakir miskin secara keseluruhan sudah tepat sasaran karena sebelum bantuan diberikan, pihak Dinas Sosial melakukan pendataan terlebih dahulu baik secara langsung yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial itu sendiri maupun secara tidak langsung yaitu berkoordinasi dengan pihak Kecamatan maupun Desa (Wawancara, 23 Juni 2021).

Tanggapan serupa berkaitan dengan ketepatan program pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Sosial terhadap fakir miskin, dikatakan oleh Hasan sebagai berikut:

Mengenai masalah ketepatan sasaran bantuan yang diberikan, menurut sepengetahuan sudah tetap sasaran yaitu masyarakat fakir miskin yang terdata di Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Walaupun selanjutnya terdapat masyarakat fakir miskin yang tidak menerima bantuan, maka masyarakat tersebut akan didata kembali, agar mereka memperoleh bantuan untuk tahun berikutnya (Wawancara, 24 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan apakah pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial telah memenuhi harapan yang diinginkan oleh masyarakat fakir miskin, Asmaul Husna mengatakan bahwa:

Masyarakat fakir miskin tentunya bantuan yang selama ini diberikan dapat terus berkelanjutan. Namun kadang-kadang harapan bukan hanya menjadi keinginan masyarakat fakir miskin itu sendiri, tapi juga harapan bagi kami dari pihak Dinas Sosial yang menginginkan bantuan-bantuan yang pernah diberikan dapat berlanjut (Wawancara, 23 Juni 2021).

Senada dengan wawancara yang disampaikan informan sebelumnya di atas, bahwa terkait dengan apakah pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial telah memenuhi harapan yang diinginkan oleh masyarakat fakir miskin, Hasan mengatakan sebagai berikut:

Terhadap bantuan yang sebelumnya pernah diterima secara keseluruhan mereka tentunya sangat berharap agar bantuan tersebut terus diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Karena menurut mereka itu, bantuan yang diterima dapat meringankan persoalan ekonomi, apalagi ditengah-tengah sedang merosotnya ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini (Wawancara, 24 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terkait pemberdayaan fakir miskin yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, apakah pemberdayaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, Zulkhaidir turut mengatakan bahwa:

Bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada fakir miskin dari 120 yang tergolong fakir miskin dimana yang bantuan BLT berjumlah 25 kepala keluarga, PKH berjumlah 28 kepala keluarga dan KIS berjumlah 22 kepala keluarga tersebut sudah didukung penuh oleh aparatur desa maupun masyarakat fakir itu sendiri, dikarenakan bantuan yang diberikan tersebut benar-benar telah dirasakan manfaatnya oleh penerimannya (Wawancara, 25 Juni 2021).

Tanggapan yang disampaikan oleh informan tersebut di atas didukung oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat fakir miskin yang dalam hal ini adalah Mariamah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro mengatakan bahwa:

Sebenarnya kalau dikatakan sejahtera bagi masyarakat fakir miskin di Desa Lueng Baro, bisa dikatakan tidak sejahtera, karena kami sadar bantuan tersebut tentu terbatas tidak setiap bulan diberikan Dinas Sosial. Namun dengan adanya bantuan tersebut sekiranya sudah memberikan manfaat bagi penerimannya untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang (Wawancara, 26 Juni 2021).

Hasil wawancara senada berkaitan dengan pemberdayaan fakir miskin yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, apakah pemberdayaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, turut disampaikan oleh Nursawati selaku penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif dalam bentuk peralatan kelontongan di Desa Lueng Baro yang mengatakan bahwa:

Bantuan yang diberikan kalau bantuan tersebut dalam bentuk alat-alat usaha seperti yang telah saya terima ini sudah cukup membantu meskipun belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan penerimannya. Tetapi



dengan adanya bantuan tersebut, setidaknya saya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan tersebut (Wawancara, 26 Juni 2021).

Dari wawancara lebih lanjut terkait dengan pemberdayaan fakir miskin yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, apakah pemberdayaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, Aminah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro mengatakan bahwa:

Bantuan BLT yang diberikan telah banyak membantu masyarakat fakir miskin Desa Lueng Baru, meskipun bantuan yang diberikan tersebut masih menaikkan tingkat kesejahteraan penerimanya. Tetapi dengan adanya bantuan tersebut, maka penerimanya seperti fakir miskin di Desa Lueng Baro telah terbantu (Wawancara, 27 Juni 2021).

Dalam wawancara lainnya yang penulis lakukan berkenaan dengan apakah pemberdayaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, Nursyahwan selaku penerima PKH di Desa Lueng Baro mengatakan hal yang sama dengan informan sebelumnya bahwa:

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya membantu tingkat kesejahteraan fakir miskin, dikarenakan bantuan tersebut relatif belum memadai dan bantuan tersebut pun adakalanya tidak berkelanjutan (Wawancara, 27 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan harapan masyarakat fakir miskin dari pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Zulkhaidir mengatakan bahwa:

Harapan yang diinginkan masyarakat fakir miskin terhadap setiap bantuan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya adalah bantuan yang diberikan tersebut bukan hanya bersifat sementara, tetapi diharapkan terus berkelanjutan diberikan kepada masyarakat fakir miskin, karena bantuan tersebut memang dibutuhkan untuk meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat fakir miskin (Wawancara, 25 Juni 2021).



Tanggapan yang disampaikan oleh informan tersebut di atas didukung oleh hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat fakir miskin yang dalam hal ini adalah Mariamah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro berkaitan harapan masyarakat fakir miskin dari pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, mengatakan bahwa:

Kami selaku penerima bantuan pemberdayaan fakir miskin dari Dinas Sosial sangat berharap agar bantuan yang diberikan tersebut dapat terus berlanjut jangan berhenti atau kadang diberikan kadang tidak, sebab bantuan yang selama ini telah diberikan sangat besar manfaatnya bagi kami masyarakat fakir miskin (Wawancara, 26 Juni 2021).

Hasil wawancara senada berkenaan dengan harapan masyarakat fakir miskin dari pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, turut disampaikan oleh Nursawati selaku penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif dalam bentuk peralatan kelontongan yang dalam wawancara penelitian ini mengatakan bahwa:

Bantuan peralatan yang saya terima diharapkan juga diberikan kepada masyarakat lain yang kekurangan dana untuk membeli peralatan usaha, sebab dengan adanya bantuan yang diberikan Dinas Sosial tersebut, tentunya dapat membantu masyarakat fakir miskin bersangkutan tanpa harus mengeluarkan biaya, karena sudah tentu peralatan usaha tersebut mahal (Wawancara, 26 Juni 2021).

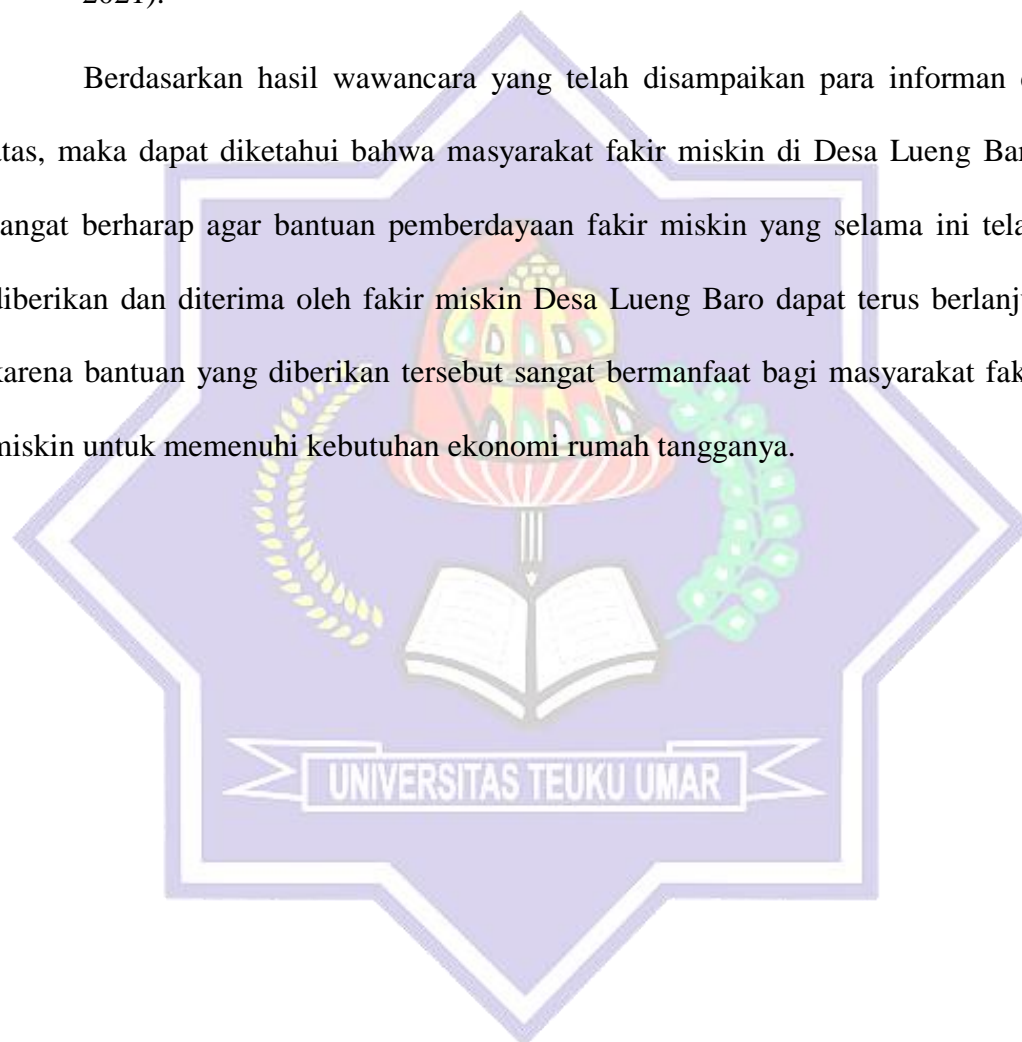
Tanggapan yang lainnya berkaitan dengan harapan masyarakat fakir miskin dari pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, disampaikan oleh Aminah selaku penerima BLT di Desa Lueng Baro yang mengatakan bahwa:

Selama ini bantuan yang diberikan sudah sangat membantu masyarakat fakir miskin, karena itu pula bantuan yang diberikan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut agar masyarakat fakir miskin ini mampu memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari (Wawancara, 27 Juni 2021).

Nursyahwan selaku penerima PKH di Desa Lueng Baro terkait dengan harapan masyarakat fakir miskin dari pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya mengatakan bahwa:

Saya berharap agar bantuan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya yang selama ini telah diterima, agar terus dilanjutkan hingga mereka tersebut benar-benar keluarga dari garis kemiskinan” (Wawancara, 27 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan para informan di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat fakir miskin di Desa Lueng Baro sangat berharap agar bantuan pemberdayaan fakir miskin yang selama ini telah diberikan dan diterima oleh fakir miskin Desa Lueng Baro dapat terus berlanjut karena bantuan yang diberikan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.



## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **5.1. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya**

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Lueng Baro terdiri dari tahap penyusunan rencana program dan mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat miskin yang akan mendapatkan bantuan pemberdayaan berupa peralatan seperti peralatan menjahit, peralatan pembuatan kue dan bantuan peralatan pertanian. Sedangkan bantuan uang tunai yang diberikan terdiri dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) serta bantuan modal usaha.

Pemberdayaan fakir miskin digambarkan dengan pendekatan sistem, yaitu: masukan, proses, keluaran (*output*), manfaat dan dampak. Masukan (*inputs*) dari pemberdayaan fakir miskin adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan proses pemberdayaan fakir miskin menunjukkan bahwa fakir miskin yang mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, terlebih dahulu diberikan pelatihan atau pendampingan sebelum bantuan tersebut diberikan bagi masyarakat fakir miskin. Pelatihan atau pendampingan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial ini tergantung bantuan yang diberikan sebagai upaya dari Dinas Sosial untuk meningkatkan keterampilan atau pemahaman fakir terhadap bantuan yang telah diberikan.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari pemberdayaan fakir miskin, yaitu mengurangi permasalahan kemiskinan pada masyarakat fakir miskin, yang mana

sebagian besar fakir miskin, khususnya yang terdapat di Desa Lueng Baro telah terbantu secara ekonomi atas bantuan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa manfaat (*outcome*) secara makro memang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin Desa Lueng Baro, tetapi dengan adanya bantuan dari Dinas Sosial tersebut, fakir miskin yang berada pada desa tersebut secara mikro telah merasa manfaat ekonomis karena mereka menilai bantuan yang diberikan tersebut, misal dengan adanya bantuan tunai, maka dapat mengurangi permasalahan ekonomi rumah tangga dan dengan adanya bantuan peralatan, maka peralatan tersebut dapat digunakan oleh fakir miskin untuk meningkatkan usaha yang dijalankan oleh fakir miskin.

Kegiatan pemberdayaan fakir miskin merupakan rangkaian program yang terencana dan harus berkelanjutan, agar hasil dari pemberdayaan tersebut bukan hanya terbatas kegiatan yang bersifat sementara untuk menyenangkan hati fakir miskin. Tetapi kegiatan tersebut, harus benar-benar memberikan solusi yang pasti bagi masyarakat miskin untuk bangkit menjadi masyarakat yang berdaya dan sejahtera yang secara ekonomi bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan namun juga mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Jim dalam Soeharto (2015) bahwa pemberdayaan merupakan proses yang ditujukan untuk mengeluarkan kedudukan masyarakat yang bermasalah secara ekonomi sehingga kebutuhan dasarnya sulit terpenuhi karena terdapat keterbatasan pada masyarakat yang bersangkutan, dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemangku kebijakan.

### **5.1.1. Peran Dinas Sosial Dalam Menyusun Rencana Pemberdayaan Fakir Miskin**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait penyusunan dan persiapan rencana pemberdayaan fakir miskin dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya khususnya pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sesuai arahan dari pemerintah dan kementerian terkait yang dalam dengan ini, Dinas Sosial secara spesifik adalah menyusun dokumen-dokumen berupa data jumlah masyarakat fakir yang diterima dari setiap Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Dokumen-dokumen yang telah disusun tersebut, dipersiapkan oleh Dinas Sosil sebagai laporan data penerima bantuan seperti BLT, KIS dan PKH kepada Kementerian Sosial.

Perlunya penyusunan dan persiapan rencana pemberdayaan fakir miskin sesuai arah pemrintah Pusat dikarenakan beberapa program pemberdayaan fakir miskin diantaranya program BLT, KIS dan PKH merupakan program nasional yang anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat. Berbeda hanya dengan program pemberdayaan berupa pemberian bantuan peralatan pembuatan kue, pertanian, menjahit dan sebagainya yang mana seluruh program tersebut diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya itu sendiri untuk memabantu permasalahan masyarakat fakir miskin yang dananya tersebut dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Selain itu, peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun rencana dan menyiapkan rencana kegiatan pemberdayaan fakir miskin pada tahun 2020 sudah berlangsung dengan baik, pihak Dinas Sosial pada praktiknya sudah berkoordinasi dengan pihak lain terutama Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa serta instansi terkait dengan tujuan agar program-program yang dijalankan



tersebut. Sehingga dari berbagai program yang telah disusun dan disiapkan tersebutnya nantinya berjalan dengan baik dan tepat sasaran, baik itu tepat secara penggunaan anggaran maupun tepat berdasarkan penerima manfaat atas program pemberdayaan tersebut.

### **5.1.2. Peran Dinas Sosial Dalam Menyiapkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam mempersiapkan program-program pemberdayaan fakir miskin bahwasannya sebelum program pemberdayaan dilaksanakan Dinas Sosial terlebih dahulu mempersiapkan tahap-tahap pelaksanaan pemberdayaan diantaranya adalah dengan melakukan pengecekan kembali data-data fakir miskin, bekerjasama dengan pihak Bank atau pemerintah Gampong sebagai penyalur bantuan program pemberdayaan. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan Dinas Sosial sebelum program pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan adalah mempersiapkan seluruh bahan-bahan sosialisasi, waktu sosialisasi dan tempat sosialisasi kepada masyarakat apabila bantuan tersebut berasal dari dinas sosial. Namun apabila program tersebut dari Pemerintah atau Kementerian terkait, maka pihak Dinas Sosial cukup mempersiapkan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyaluran bantuan program pemberdayaan fakir miskin. Sedangkan persiapan program dari Pemerintahan Gampong yang mendata turut diberitahukan adalah ikut dilibatkan dan diminta untuk segera mempersiapkan sosialisasi kepada masyarakat yang telah didata dan menerima bantuan program pemberdayaan fakir miskin.

Dengan adanya persiapan program pemberdayaan fakir miskin yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, maka program yang akan

dilaksanakan tersebut menjadi lebih terarah dan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sebab semakin cepat program pemberdayaan itu dipersiapkan untuk dilaksanakan, maka semakin cepat pula, fakir miskin merasakan manfaat atas bantuan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Karena itu, persiapan program pemberdayaan melalui koordinasi antar elemen-elemen terkait baik itu pemerintah kecamatan maupun desa sangat penting dilakukan oleh Dinas Sosial, disamping pihak Dinas mempersiapkan tahap-tahap akan dilaksanakannya pemberdayaan diantaranya adalah dengan melakukan pengecekan kembali data-data fakir miskin di Kabupaten Nagan Raya.

### **5.1.3. Peran Dinas Sosial Dalam Mensosialisasikan Program Pemberdayaan Fakir Miskin**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan fakir miskin baik dilakukan setelah program pemberdayaan tersebut siap untuk dilaksanakan di lapangan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut diawali dengan sosialisasi kepada jajaran Pemerintah Kecamatan dan selanjutnya dari Pemerintah Kecamatan diteruskan kepada Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Sehingga terkait dengan sosialisasi yang telah dilakukan ini merupakan sosialisasi dalam bentuk tidak langsung, artinya masyarakat fakir miskin terutama di Desa Lueng Baro sebenarnya tidak memperoleh sosialisasi secara langsung dari Dinas Sosial terkait dengan program-program pemberdayaan fakir miskin yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

Sosialisasi ini merupakan sosialisasi program kerja dari Dinas Sosial dan sebagai upaya untuk memberikan informan dan mengajak setiap instansi terkait

agar bekerjasama dalam memantau kelancaran program pemberdayaan fakir miskin pada setiap Desa di Kabupaten Nagan Raya. Sementara itu, pada tataran masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial atas program pemberdayaan fakir miskin, sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, apabila bantuan tersebut merupakan bantuan yang berasal dari pendanaan yang diusulkan Dinas Sosial sebagai program pemberdayaan fakir miskin, seperti program pemberdayaan dengan memberikan bantuan peralatan pertanian, usaha dan lain sebagainya.



Gambar 4.1. Aparatur Kecamatan Mengikuti Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Kantor Dinas Sosial Nagan Raya



Photo 10. Masyarakat Mengikuti Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Kantor Dinas Sosial Nagan Raya

Hal ini menunjukkan bahwa terkait sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro, dilaksanakan Dinas Sosial melalui mekanisme tidak langsung, sebab masyarakat memperoleh informasi pemberdayaan melalui Pemerintah Desa setempat, ketika program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Terkecuali berkenaan dengan beberapa program seperti program pemberdayaan melalui pemberian bantuan peralatan menjahit, pertanian dan lain sebagainya yang merupakan program Dinas Sosial itu sendiri, dimana Dinas Sosial biasanya melakukan sosialisasi secara langsung kepada fakir

miskin, sebab sifat dari program tersebut terbatas penerima manfaatnya, di mana penerimanya mendatangi langsung ke kantor Dinas Sosial untuk memperoleh sosialisasi sekaligus bantuan dari program pemberdayaan fakir miskin.

#### **5.1.4. Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin**

Sebagaimana pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin, maka peran Dinas Sosial adalah melaksanakan program-program tersebut dengan cara berkoordinasi kepada semua jajaran pemerintah Kecamatan dan Desa di seluruh Kabupaten Nagan Raya untuk menyalurkan bantuan pemberdayaan fakir miskin kepada masyarakat yang sebelumnya telah didata dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program pemberdayaan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten ataupun kementerian Sosial, dimana dari data yang penulis kumpulkan menunjukkan bahwa di Desa Lueng Baro terdapat fakir miskin terdiri dari kelompok fakir sebanyak 69 kepala keluarga dan miskin sebanyak 120 kepala keluarga dimana yang menerima bantuan BLT berjumlah 25 kepala keluarga, PKH berjumlah 28 kepala keluarga dan KIS berjumlah 22 kepala keluarga.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin, khususnya kepada fakir miskin yang berada di Desa Lueng Baro pada tahun 2021 diketahui masih terdapat kekurangan. Beberapa kekurangan terkait dengan peran Dinas Sosial dalam melaksanakan pemberdayaan fakir miskin tersebut adalah program pemberdayaan tersebut masih belum tepat sasaran sehingga didapati masih ada sebagian kecil masyarakat fakir miskin yang masih belum mendapatkan program pemberdayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.



Namun demikian, kekurangan tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, sehingga hal tersebut menghambat kesesuaian program pemberdayaan fakir miskin khususnya di Desa Lueng Baro. Kendala-kendala tersebut diantaranya yakni secara umum Dinas Sosial terkendala dengan anggaran yang terbatas untuk melaksanakan program pemberdayaan yang diusulkan kepada pemerintah daerah, karena tidak semua program yang disusun atau disiapkan tersebut, misalnya bantuan alat-alat yang menunjang produktivitas masyarakat fakir miskin disetujui untuk didanai melalui keuangan desa. Kendala yang lain adalah adanya data yang kurang valid yang diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dari Pemerintah Kecamatan atau Desa menjadi penyebab masih adanya masyarakat fakir miskin yang belum mendapatkan program pemberdayaan masyarakat.

Dengan mengacu pada penjelasan tersebut, maka pemberdayaan terhadap fakir miskin di Desa Lueng Baro yang selama ini diperankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya juga harus dianggap sebagai upaya untuk mengeluarkan kedudukan atau status sosial fakir tersebut sebagai masyarakat yang tidak berdaya secara ekonomi menjadi berdaya secara ekonomi melalui bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya selaku institusi pemerintah yang berwenang dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Kabupaten Nagan Raya, perlu untuk menjalin koordinasi dengan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dalam upaya memperkuat pelaksanaan pemberdayaan agar terus berkelanjutan.

Hal ini penting dilakukan dengan melihat kendala yang dialami oleh Dinas Sosial yang menyebutkan bahwa banyaknya program pemberdayaan yang terhenti



di Kabupaten Nagan Raya, termasuk di Desa Lueng Baro karena tidak tersedianya anggaran untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan pada tahun berikutnya. Titik lemah ini harus dicarikan solusinya. Sebab, apabila pemberdayaan fakir miskin yang selama ini dilakukan menjadi terhenti tentu berakibat pada tidak tercapainya target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya, sebab fakir miskin yang sebelumnya pernah mendapat program pemberdayaan, belum sepenuhnya mampu secara ekonomi keluar dari permasalahan ketidaksejahteraan.

Menurut Zubaedi (2013, h. 12) bahwa pemberdayaan tidak boleh dibatasi pada pemberian bantuan semata, namun harus lebih kepada penguatan kelompok yang diberdayakan agar kelompok menjadi produktif dari hal-hal yang tidak produktif setelah mereka menerima bantuan. Produktif yang dimaksud tersebut adalah benar-benar memanfaatkan bantuan yang telah diterima untuk digunakan sebagai modal untuk menentukan masa depan mereka. Oleh karena itu dalam perspektif Jim sebagaimana dikutip Soeharto (2015) bahwa pemberdayaan harus dimaknai sebagai agenda sosial politik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang sebelumnya terbelakang secara ekonomi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai disertai dengan pentingnya ada pendampingan yang terus berkelanjutan hingga masyarakat bersangkutan tersebut benar-benar mandiri secara ekonomi.

## **5.2. Ketepatan Pemberdayaan Fakir Miskin Yang Dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya**

Menurut Suhartini dkk (2011, h. 7-8) bahwa tujuan utama pemberdayaan yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya kelompok kurang mampu, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh

sebuah perubahan sosial yaitu mempunyai pengetahuan dan kemauan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik bersifat fisik, ekonomi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan kehidupannya. Tujuan lainnya pemberdayaan adalah untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan, serta meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomiannya.

Secara umum, dari hasil penelitian mengenai ketepatan pemberdayaan pada masyarakat fakir miskin yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial diketahui sudah tepat, dikarenakan fakir miskin yang berada di Desa Lueng Baro sepenuhnya telah mendapatkan pemberdayaan berupa diterimanya uang tunai sesuai dengan program yang diterimanya dan peralatan-peralatan usaha sesuai dengan jenis usaha yang ditekuni oleh masyarakat fakir miskin. Namun, demikian pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin yang dilakukan Dinas Sosial tersebut, masih belum memenuhi harapan masyarakat fakir miskin, karena terdapat beberapa program pemberdayaan seperti bantuan dan pelatihan keterampilan menggunakan alat-alat seperti mesin jahit dan peralatan pertanian pada Desa Lueng Baro sudah terhenti atau tidak berkelanjutan.

Selain program tersebut, beberapa program lainnya yang dinyatakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya tidak dilanjutkan kembali adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan bantuan modal usaha, dengan alasan program tersebut terkendala dengan tidak disediakan anggaran dari Pemerintah. Sehingga terkait dengan bantuan tunai yang sekarang ini masih berkelanjutan adalah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan

tidak berlanjutnya beberapa program bantuan tunai tersebut, maka secara otomatis terdapat masyarakat miskin yang kehilangan haknya untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dalam pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro yang masih belum optimal adalah peran Dinas Sosial dalam melaksanakan pemberdayaan fakir miskin tersebut masih belum tepat sasaran sehingga didapati ada sebagian kecil masyarakat fakir miskin yang masih belum mendapatkan program pemberdayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
2. Ketepatan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan belum sesuai target yang diharapkan dikarenakan berbagai program tersebut masih belum optimal terutama terkait dengan data fakir miskin yang didata oleh Pemerintah Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.

#### **6.2. Saran**

Penelitian ini disarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya untuk dapat menghimbau jajaran satuan kerja pemerintah daerah mulai dari tingkat Kecamatan dan Desa berupa melakukan pendataan masyarakat fakir miskin disertai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat fakir miskin dengan tujuan agar kegiatan pemberdayaan fakir miskin menjadi tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anjela, Ririn. 2019. *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Skripsi Niversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arsyad, Lincoln. 2013. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFPE.
- BPS. 2020. *Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2019-2020*. Di akses pada 31 Februari 2021 melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faisal, Sanapiah, 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Fitriani, Rima. 2013. *Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Kartu Menuju Sehat*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Poerwoko dan Totok. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hasanah, Nurma Rifatun. 2019. *Peranan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Uep (Usaha Ekonomi Produktif) Dan Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi di Kecamatan Danau Teluk)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
- Suhartini dkk. 2011. *Model pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Suharto. 2006. *Membangun Masyrakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama.
- Sitepu. 2012. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. E-Jurnal Universitas Udayana, Vol 2, No.1.
- Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan Fakir Miskin*.



### **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

- A. Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya
1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam menyusun dan mempersiapkan rencana pemberdayaan fakir miskin?
  2. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam mensosialisasikan program-program pemberdayaan fakir miskin?
  3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan fakir miskin?
  4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin di Desa Lueng Baro?
  5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait kebutuhan fakir miskin yang harus diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya?
- B. Ketepatan Pemberdayaan Fakir Miskin Yang Dilaksanakan Dinas Sosial di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.
1. Apa saja program-program yang telah dilaksanakan Dinas Sosial dalam kegiatan pemberdayaan fakir miskin?
  2. Bagaimanakah ketepatan program pemberdayaan yang dilaksanakan Dinas Sosial terhadap fakir miskin?
  3. Apakah pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial telah memenuhi harapan yang diinginkan oleh masyarakat fakir miskin?
  4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait pemberdayaan fakir miskin yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial? Apakah pemberdayaan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin?
  5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang diharapkan masyarakat fakir miskin dari pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya?

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN**



Photo 1. Wawancara Penulis Dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinsos Nagan Raya



Photo 2. Wawancara Penulis Dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial Dinsos Nagan Raya



Photo 3. Wawancara Penulis dengan Keuchik Gampong Lueng Baro



Photo 4. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Lueng Baro



Photo 5. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Lueng Baro



Photo 6. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Lueng Baro





Photo 7. Wawancara Penulis dengan Masyarakat Gampong Lueng Baro



Photo 8. Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kepada Camat



Photo 9. Masyarakat Mengikuti Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya



Photo 10. Masyarakat Mengikuti Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
 Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**NOMOR : 594/UN59.5/HK.04/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**ATAS NAMA MAULIDAR NIM 1705905010100**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA MAULIDAR NIM 1705905010100 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

KESATU...





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
 Laman fisp.utu.ac.id, e-mail fisp@utu.ac.id

- KESATU Menunjuk Nodi Marefanda, M.A.P sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Maulidar NIM 1705905010100 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh  
 Pada Tanggal 16 November 2020  
 An. REKTOR  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK  


Basri  
 NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 719 UN59.5 PT.01.05/2021

15 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth,

Kepala Dinas Sosial Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya

Di

Tempat

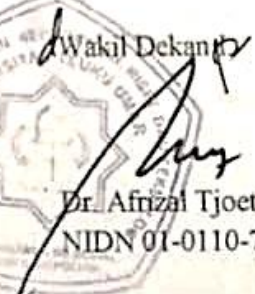
Dengan Hormat;

Schubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Maulidar  
Nim : 1705905010100  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
No. Hp : 085213226133  
Dosen Pembimbing : Nodi Marefanda, M.A.P

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Wakil Dekan  
  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

## DINAS SOSIAL

Jalan Ishak Peukan Komplek Perkantoran Suka Makmue Kode Pos 23671  
Email [dinsosnaganraya@gmail.com](mailto:dinsosnaganraya@gmail.com)

Suka Makmue, 22 Juni 2021

Nomor : 460 / **233** / 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth;  
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik UTU  
di -

### Tempat

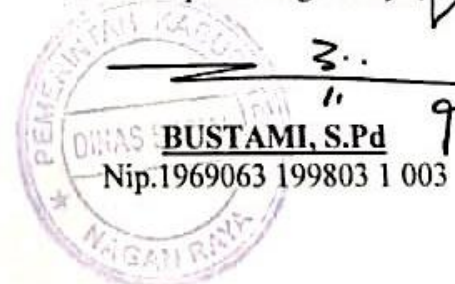
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : Maulidar  
NIM : 1705905010100  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan wawancara, penelitian dan pengambilan data pada Dinas Sosial Kab. Nagan Raya keperluan persiapan penyusunan/penulisan karya akhir (Skripsi) T. A 2020/2021.

2. Demikian untuk dimaklumi dan menjadi bahan seperlunya terima kasih.

*uf* Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Nagan Raya







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59  
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 719/UN59.5/PT.01.05/2021

15 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth,

**Keuchik Gmping Lueng Baro, Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya**

Di

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Maulidar  
Nim : 1705905010100  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
No. Hp : 085213226133  
Dosen Pembimbing : Nodi Marefanda, M.A.P

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Wakil Dekan  
Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si  
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
KECAMATAN SUKA MAKMUE  
GAMpong LUENG BARO

Jln. Simpang Peut - Jeuram Email luengbaro.sukamakmue@gmail.com Kode POS 23671

SURAT KETERANGAN BALASAN PENELITIAN

Nomor : 415.41 / 214 / 2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Teuku Umar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 723/UN59.5/PT.01.05/2021, hal Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan data untuk Skripsi pada Tanggal 24 Juni 2021, maka Keuchik Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : MAULIDAR  
NIM : 1705905010100  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi : Administrasi Negara  
Jenjang : S 1

Benar telah mengadakan Penelitian di Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Pada Tanggal 18 Juni s.d 02 Juli 2021 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **“Peran Dinas Sosial Dalam Perberdayaan Fakir Miskin di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”**.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lueng Baro, 02 Juli 2021  
Keuchik Gampong Lueng Baro

(PGK. MUSTAFA.R)